



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SISTEM PENDAFTARAN DAN PENAGIHAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

(A.Md) Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

SYAHRUL HIDAYAD

NIM: 01870613788



**PROGRAM D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2021 M / 1442 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : SYAHRUL HIDAYAD
NIM : 01870613788
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI(ENAM)
JUDUL : SISTEM PENDAFTARAN DAN PENAGIHAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, SH, M. Hum
 NIP. 130712072

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2001

KETUAPRODI

Sahwitri Triandani, SE, M. Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

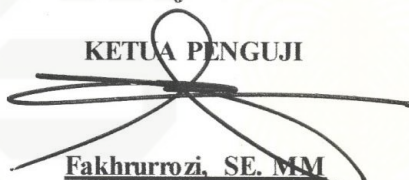
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR


NAMA : SYAHRUL HIDAYAD
 NIM : 01870613788
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : SISTEM PENDAFTARAN DAN PENAGIHAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU
 TANGGAL UJIAN : 13 JULI 2021

Disetujui Oleh :


KETUA PENGUJI


Fakhurrozi, SE. MM
 NIP. 19670725 200003 1 002

PENGUJI I


Dr. Potriana, SE. MM
 NIP. 19691120 200701 2 023

PENGUJI II


Rony Jaya, S. Sos, M.Si
 NIK. 130 717 060

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

OLEH:

SYAHRUL HIDAYAD
NIM 01870613788

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet, Bagaimana Sistem Penagihan Pajak Sarang Burung Walet dan Apakah Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah Optimal. Jenis data yang penulis peroleh yaitu jenis data primer dan jenis data skunder, Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Dan juga penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif dalam menganalisa data, dan berdasar hasil yang penulis dapatkan dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet di Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan dua sistem yaitu sistem pendaftaran secara langsung dan juga sistem pendaftaran secara online. Sedangkan Sistem penagihan Pajak Sarang Burung Walet yaitu dengan menyampaikan surat teguran, surat paksa, surat sita dan kemudian pelelangan. Dan berdasarkan pendaftaran dan penagihan pajak sarang burung walet di kabupaten kepulauan meranti pembayaran pajak sarang burung walet sudah optimal.

Kata Kunci: Pendaftaran, Penagihan Pajak Sarang Burung Walet

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Tugas Akhir ini berjudul **“Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Wallet Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**. Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan TA ini masih jauh dari kesempurnaa dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu menulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan TA ini.

Penyelesaian TA ini tidak luput dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua, Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Evasufiana tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing serta memberikan cinta dan kasih sayangnya dengan penuh kesabaran. Ibu yang melahirkan yang senantiasa mendo'akan disetiap langkah.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
3. Ibu Dr. HJ. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku kepala Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Iren Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi serta membantu dalam memperbaiki kesalahan –kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Kepada seluruh dosen pendidik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada segenap jajaran pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Amin Ya Rabbal'alam.

Semoga semua bantuan dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 03 juli 2021

Penulis

Syahrul Hidayat
NIM :01870613788

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penuliisan.....	7
1.3.1 Tujuan penulisan.....	7
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.4.2 Waktu Penulisan.....	8
1.4.3 Jenis Data.....	8
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6 Analisa Data	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	12
2.2 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	13
2.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	13
2.4 Uraian Tugas	13
2.5 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah....	22

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori	23
3.1.1 Pengertian Sistem	23
3.1.2 Pengertian Pajak	24
3.1.3 Fungsi Pajak.....	25
3.1.4 Jenis-Jenis Pajak	27
3.1.5 Pengelompokan Pajak.....	29
3.1.6 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	30
3.1.7 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah	31
3.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	32
3.1.9 Pengertian Pajak Sarang Burung Walet.....	34
3.1.10 Pendaftaran NPWP Sarang Burung Walet.....	36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.12 Indikator Penagihan Pajak Sarang Burung Walet.....	38
3.1.13 Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet	39
3.1.14 Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet	40
3.1.15 Tarif Pajak Sarang Burung Walet.....	40
3.1.16 Pandangan Pajak Menurut Islam	40
3.2 Tinjauan Praktek	43
3.2.1 Sistem Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet.....	43
3.2.2 Sistem Penagihan Pajak Sarang Burung Walet	48
3.2.3 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet	52
3.2.4 Dasar Penagihan Pajak.....	53
3.2.5 Hak Wajib Pajak Dalam Penagihan	54
3.2.6 Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penagihan	54
3.2.7 Kadaluarsa Penagihan Pajak	55
3.2.8 Ketentuan Pidana Pajak Sarang Burung Walet.....	55
3.2.9 Kendala-Kendala Dalam Pendaftaran dan Penagihan pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	56
3.2.10 Pengoptimalan sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	59
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	5
Tabel 3.1	36
Tabel 3.2	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	22
Gambar 3.1	48
Gambar 3.2	49
Gambar 3.3	50
Gambar 3.4	54
Gambar 3.5	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sehingga dengan adanya Undang-Undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam sejarah pemerintah daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber pemungutan yang dapat diandalkan oleh daerah, sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pemungutan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang pajak daerah dan

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

retribusi daerah yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Undang-Undang No. 18 tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun pemungutannya, Dalam perkembangan penerapan Undang-Undang tersebut, pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukan perubahan penyempurnaan seiring dengan perkembangannya situasi perekonomian secara mikro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan demikian, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Lahir sebagai penyempurna terhadap Undang-Undang No. 18 tahun 1997.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemungutan pajak daerah ini merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemungutan ini dikenakan kepada anggota masyarakat wajib pajak dan Badan sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jenis-jenis Pajak Daerah yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan tahap hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah pengusaha penakaran Sarang Burung Walet. Burung walet yang bersarang dipinggir sungai, goa-goa alam/buatan, rumah-rumah penduduk, ruko dan bangunan lainnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Adapun jumlah pengusaha Sarang Burung Walet yang ada diseluruh kecamatan di kabupaten kepulauan meranti pada tahun 2020 berjumlah 962 buah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tersebar di 9 kecamatan kabupaten kepulauan meranti, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah Penangkaran Pajak Sarang Burung Walet di 9 kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	TEBING TINGGI	285
2	TEBING TINGGI BARAT	43
3	TEBING TINGGI TIMUR	115
4	RANGSANG	144
5	RANGSANG PESISIR	25
6	RANGSANG BARAT	100
7	MERBAU	78
8	PULAU MERBAU	55
9	TASIK PUYU	117
	JUMLAH	962

Sumber: BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berasal dari penangkaran burung walet dinilai cukup potensial. Dimana setiap kecamatan yang ada, masing-masing memiliki penagkaran sarang burung walet. Sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan masukkan pendapatan kepada daerah adalah pajak Sarang Burung Walet.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibawah ini terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi pendafaran pajak Sarang Burung Walet yaitu:

1. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui sistem pendaftarannya pajak sarang burung walet.
2. Banyak wajib pajak yang Kurangnya Kesadaran dalam mendaftar pajak
3. Wajib pajak tidak mau mendaftar pajak, dengan alasan kurangnya keuntungan yang didapatinya.

Dalam pencapaian target dan realisasi pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Kepulauan Meranti (2018-2020)

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2018	500.000.000	598.480.525	119,70%
2	2019	500.000.000	705.728.400	141,15%
3	2020	550.000.000	725.015.137	131,82%

Sumber: BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, 2019, dan 2020 realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat stabil. Sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas pada tahun 2018 realisasi Rp. 598.480.525 dari target Rp. 500.000.000 atau 119,70% pada tahun 2019 realisasi Rp. 705.728.400 dari target Rp. 500.000.000 atau 141,15% dan pada tahun 2020 realisasi Rp.



725.015.137 dari target Rp. 550.000.000 atau 131,82% hal ini menunjukkan bahwa pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah optimal dan mencapai target.

Dibawah ini terdapat gejala yang dinilai mempengaruhi sistem standarisasi penagihan pajak sarang burung walet diantaranya:

1. Dalam proses penagihan pajak tersebut, pengusaha sarang burung walet mengakui belum mengetahui sistem penetapan penagihan pajak, sehingga merasa tidak memahami dan kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak walet.
2. Karna kurangnya pengawasan sehingga banyak penangkar sarang burung walet mengaku tidak mendapat hasil saat panen sehingga pajak sarang tidak bisa ditagih.

Kemudian banyak pengusaha pajak sarang burung walet yang berdomisili di pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengaku kesulitan dalam mengetahui Sistem Penagihan Pajak Sarang Burung Walet tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik dan perlu membahas permasalahan dengan permasalahan yang ada dengan mengambil judul **“Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan memilih judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Sistem Pendaftaran Pajak Sarang Burung Wallet di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana Sistem Penagihan Pajak Sarang Burung Wallet di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Apakah Pembayaran Pajak Sarang Burung Wallet sudah Optimal Melalui Sistem Pendaftaran dan Penagihan di Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan penulisan

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, tujuan penulis adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Pendaftaran Pajak Sarang Burung Wallet di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Penagihan Pajak Sarang Burung Wallet di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Untuk Mengetahui Pembayaran Pajak Sarang Burung Wallet sudah Optimal Melalui Sistem Pendaftaran dan Penagihan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah yang diteliti.
2. Untuk dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang

1.4

Metode Penelitian

1.4.1

Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Jalan Merdeka, Selatpanjang kota, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia.

1.4.2

Waktu Penulisan

Pada penulisan ini dilakukan pada bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021.

1.4.3

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada pegawai Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kepulauan Meranti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui

Burung Wallet di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pajak Sarang Burung Wallet khususnya terhadap Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Wallet di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat atau lokasi penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penulisan tugas akhir ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2009:166) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:72) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung dengan permasalahan peneliti.

1.6 Analisa Data

Analisa dapat dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif dan kualitatif. kualitatif adalah suatu cara pengumpulan dan penyajian data, sehingga mudah untuk dipahami dan memberikan informasi yang berguna. Deskriptif hanya mereduksi, menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, fenomena atau keadaan kedalam

beberapa besaran untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti.
(Susetyo. 2017:4)

1.7 Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (*job description*), visi misi, tujuan Badan Pengeloalaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan ini, karena memuat tentang tinjauan teori dan praktek yang terdiri dari pengertian sitem, pengertian pajak, fungsi dan jenis pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian burung walet , pada bab ini juga menjelaskan bagaimana sistem

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran dan penagihan pajak sarang burung wallet pada Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV

: PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang temukan atas dasar penelitian yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Awalnya Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang bertempat tinggal di jalan Merdeka No. 64 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia pada tanggal 11 Agustus Tahun 2006 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menggelar Peripuna dan mengesahkan Ranperda Tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Setelah itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Awal berdirinya Kantor BPPRD dikepalai oleh Bapak Bambang Supriyanti, SE. MM. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) ini pun akhirnya berpindah tempat di jalan Banglas Depan Gedung Afifa, selatpanjang, Kabupaten kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Pada tanggal 31 juli 2017 terjadi pergantian Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak H. Herman. SE. MT. tidak lama setelah itu pada tanggal 5 januari 2018 terjadi pergantian pimpinan yaitu Bapak Ery Suhairi, S.Sos dan pada tanggal 8 januari 2020 terjadi lagi pergantian pemimpin yaitu Bapak Mardiansyah S.STP, M.AP hingga sekarang. Badan ini

mengurus Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Mengelola Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2.2 Visi, Misi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

“Profesional dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan utama Kabupaten Kepulauan Meranti”

2. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

- a. Meningkatkan pelayanan yang transparan
- b. Meningkatkan sistem pengolah data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegritas, berdedikasi, serta amanah
- d. Menumbuh kembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah

2.3 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Badan pengelola pajak dan retribusi daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengelola.

2.4 Uraian Tugas

1. Bidang Sekretariat

Adapun tugas pokok adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan rencana kerja sekretariat;
- b. Penyusunan rencana aksi (action plan) dan skedul waktu (time schedule) pelaksanaan pekerjaan sekretariat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan;
- d. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekretariat;
- e. Melakukan koordinasi internal dan pengawasan internal secara periodik minimal sekali dalam satu bulan;
- f. Melakukan konsolidasi program/kegiatan bidang;
- g. Melakukan konsolidasi realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan bidang;
- h. Mengevaluasi hasil kerja ASN dilingkungan Badan sebagai bahan Pembinaan;
- i. Memberi petunjuk bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
- j. Mengkoordinasikan tugas bawahan dilingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan dilingkup sekretaris;
- l. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- m. Memeriksa pelaksanaan tugas lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- n. Mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretarisan agar sesuai tepat pada waktunya;
- o. Menilai konsep naskah dinas dari bawahan dan unit kerja lainnya dilingkungan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- p. Mengatur pemberian layanan administrasi kepada semua unit kerja dilingkungan Badan agar pelaksanaannya tertib;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariat baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental pada pimpinan;
- r. Membuat laporan program/kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan;
- s. Melaksanakan pengelolaan data elektronik dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi pada badan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- t. Saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa Sub Bagian yaitu:

- a. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan
 - b. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Adapun tugas pokok bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Penyusunan draft sistem dan prosedur perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang, memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental kepada kepala Badan;
- g. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- h. Pelaksanaan evaluasi kepada aparaturnya pelaksanaan pelayanan, pemungutan dan administrasi pelayanan pajak dan retribusi pajak;
- i. Pelaksanaan verifikasi data ketetapan pajak dan retribusi daerah dan data realisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- j. Melakukan kajian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
- k. Menyusun metode intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- l. Menyusun metode penetapan piutang pendapatan asli daerah;
- m. Menyusun metode penagihan pendapatan asli daerah;
- n. Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- o. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak sebagai uji ketaatan terhadap peraturan perpajakan perlindungan pajak; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi beberapa sub Bagian yaitu:

- a. Sub bidang perencanaan pendapatan daerah;
- b. Sub bidang pengembangan pendapatan daerah; dan
- c. Sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah.

3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Adapun tugas pokok bidang pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pajak dan retribusi daerah;
- b. Penyusunan rencana aksi dan skedul waktu pelaksanaan pekerjaan bidang pajak dan retribusi daerah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pajak dan retribusi daerah;
- d. Penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah;
- e. Penyusunan draft perda pajak dan retribusi daerah;
- f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. Memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
- h. Memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- j. Melapor pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis dan berkala, maupun insidental kepada kepala Badan;
- k. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- l. Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang kewajiban membayar pajak dan Retribusi Daerah;
- m. Penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak dan retribusi;
- n. Pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- o. Melakukan pendataan dan validasi data wajib pajak dan wajib retribusi;
- p. Melakukan permutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
- q. Menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
- r. Pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta memberi kartu pengenalan wajib pajak serta nomor wajib pajak daerah (NWPD) kepada wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi;
- s. Melakukan pendaftaran kepada para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- t. Menerbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- u. Mengoreksi dan menandatangani surat ketetapan pajak/retribusi daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Ketetapan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Tagihan Pajak/Retribusi Daerah sesuai ketentuan;

- y. Menghimpun dan membukukan seluruh surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah jenis tertentu dalam Buku Register SKPD/SKRD Tahunan;
- w. Menerima dan menindaklanjuti surat keberatan atau permohonan keringanan dari wajib pajak atas penetapan dan penagihan perhitungan pajak;
- x. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penetapan;
- y. Menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- z. Menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- aa. Melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- bb. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penagihan;
- cc. Menghitung piutang pajak dan piutang retribusi berdasarkan nomor, nama, nilai dan alamat wajib pajak dan wajib retribusi; dan
- dd. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah membawahi beberapa sub Bidang yaitu:

- a. Sub bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. sub bidang penetapan;

c. Sub bidang penagihan.

4. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB

Adapun tugas pokok bidang pengelolaan PBB dan BPHTB sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan PBB dan BPHTP;
- b. Penyusunan draft rencana aksi dan skedul waktu pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Penyusunan draft sistem dan prosedur pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Penyusunan draft surat edaran kepala daerah tentang pembayaran pengelolaan PBB dan BPHTB;
- e. Penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) bidang pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. Pemantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
- g. Pemeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas badan baik secara lisan, tertulis berkala, maupun insidental kepada kepala badan;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
- l. Melakukan validasi data wajib pajak PBB P2;
- m. Melakukan penilaian kembali data objek pajak PBB P2;
- n. Menyampaikan SPT PBB P2 kepada wajib pajak;
- o. Melakukan penagihan PBB P2 kepada wajib pajak;
- p. Menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB;
- q. Memberikan penghargaan termasuk penerapan sanksi bagi pelanggar pajak daerah;
- r. Menyediakan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB membawahi sub bidang yaitu:

- a. Sub bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. Sub bidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan
- c. Sub bidang Penagihan dan Keberatan

5. Jenis Kepegawaian

Adapun jenis kepegawaian yang bekerja di Badan Pengelolaan Pajak dan

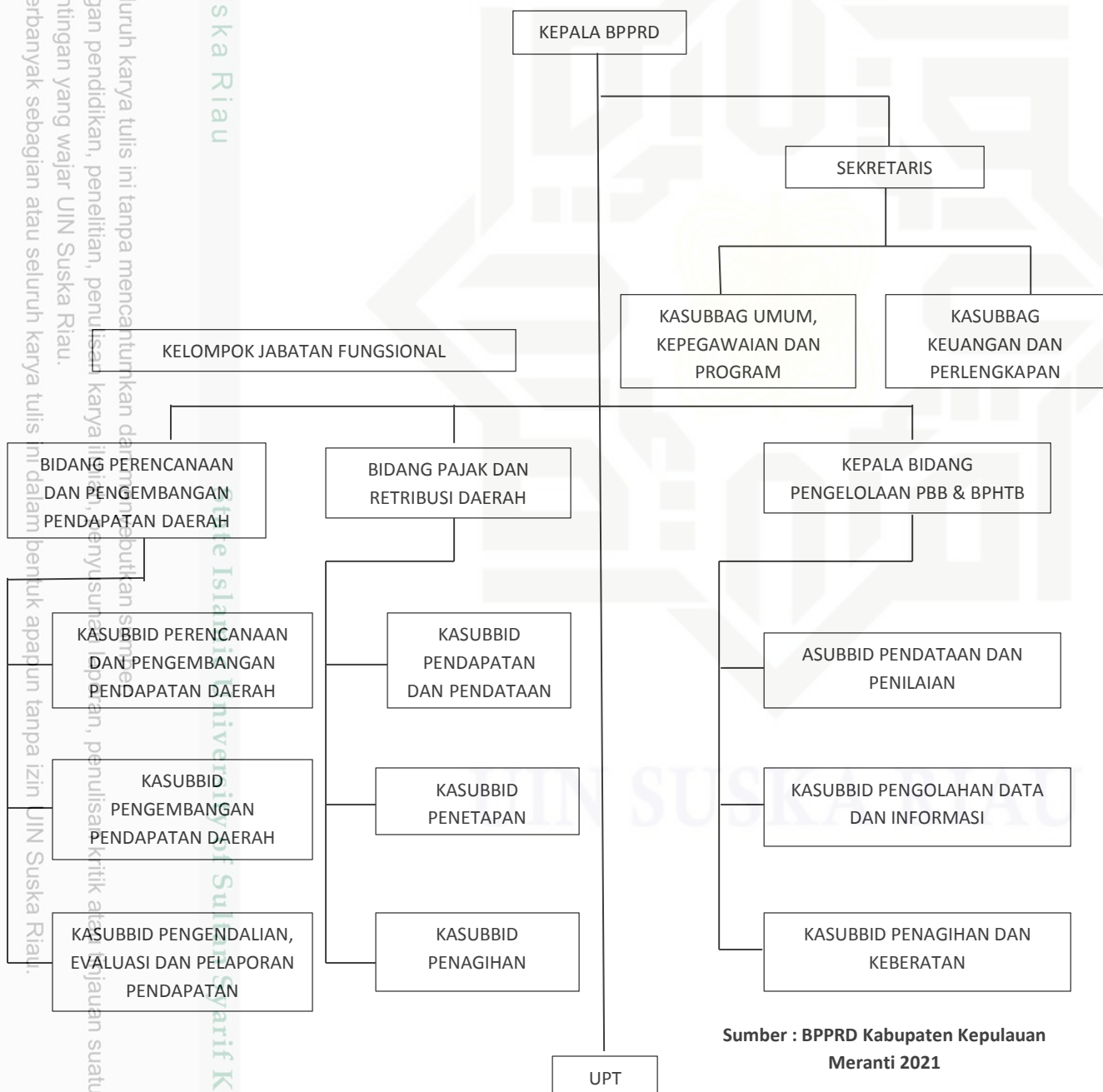
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu mereka yang telah melalui masa sebagai sementara dan telah memenuhi persyaratan pada kantor tersebut.
- b. Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- c. Pegawai Honorer dan Pegawai Honorer Kontrak.

- d. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu mereka yang diangkat berdasarkan kebutuhan kantor dan telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan pada kantor tersebut.
- e. Kelompok Fungsional.

2.5 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Gambar 2.1. Struktur organisasi BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber : BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti 2021



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 70 Tahun 2011, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk Marga Colloce yaitu Collocelia Fuchlia Haga, Collocelia Maxina, Collocelia Esculant dan Collocelia Linchi.

1. Sistem Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan dua cara yaitu: Secara langsung, yang mana sistem ini wajib pajak mendatangi dan mengisi langsung formulir pendaftaran NPWP di KPP atau KP2KP. Secara Online dimana sistem ini wajib pajak mengunjungi canel/akun resmi KPP atau KP2KP kemudian mengregistrasi dan mengupload persyratan secara online.
2. Sistem Penagihan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan empat langkah yaitu: Memberikan Surat Teguran, bagi wajib pajak yang sudah terlambat membayar pajak dari tanggal yang telah ditetapkan, Memberikan Surat Paksa, bagi wajib Pajak yang sudah diberikan surat teguran kemudian masih tidak membayar pajak, maka ia akan diberikan surat paksa, Memberikan Surat Sita, bagi wajib pajak yang tidak membayar juga setelah diberikan surat paksa, kemudiaan fiskus akan menyita usahanya tersebut, Setelah disita maka hasil sitaan akan dilelang.
3. Hasil penelitian penulis diatas bisa disimpulkan berdasarkan data target dan realisasi, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, bahwa pembayaran



pajak sarang burung walet melalui sistem pendaftaran dan penagihan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah optimal

4.2 Saran

Setelah penulis mengamati dan menganalisa secara sekilas tentang Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis ingin memberi saran yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah yaitu:

1. Sebagai instansi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat maka perlu rasanya ditingkatkan beberapa faktor yang penting seperti meningkatkan sosialisasi Prosedur Pendaftaran pajak Sarang Burung Walet secara rutin .
2. Instansi lebih memperketat sanksi bagi pelanggaran wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya agar wajib pajak sadar akan kewajibannya.
3. Untuk masyarakat yang aksesnya terlalu jauh sehingga enggan mendaftarkan usaha pajak sarang burung waletnya, hendaknya instansi mendirikan relawan relawan pajak disetiap plosok-plosok desa .
4. dan instansi lebih meningkatkan pengawasan dibagian penagihan agar tidak ada penyelewengan dalam pelaporan hasil usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Jogiyanto, 2009. Analisis dan Desain Sistem Informasi, Yogyakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2017. Perpajakan Edisi Terbaru 2017, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mulyadi, 2010. Sistem Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat
- Pajak Dalam Perspektif Islam, diakses dari (http://www.academia.edu/36591535/Pajak_dalam_Perspektif_Islam) pada 28 Maret 2021
- Peraturan Bupati Nomor. 70 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011. Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10, Jakarta: Salemba empat
- Siahaan, Marhot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: Rajawali Pers
- Sugiyanto, 2009. Metode Penelitian, Bandung: Cv Alfabeta
- Sutarman, 2009. Pengantar Teknologi Informasi, Jakarta: Bumi Aksara
- Susanto, azhar. 2013. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susetyo, Budi. 2017. Statistika untuk Analisi Data Penelitian, Bandung: PT Refika Aditama

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah





LAMPIRAN

WAWANCARA

1. Bagaimana Sistem Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
 2. Bagaimana Sistem Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
 3. Apa saja kendala-kendala yang terjadi pada pendaftaran dan penagihan Pajak Sarang Burung Walet?
 4. Bagaimana upaya pemerintah saat ini untuk meningkatkan pendapatan pajak sarang burung walet pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?
- Apakah Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sudah Optimal melalui Sistem Pendaftaran dan Penagihan pajak di Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Bersama Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti



Wawancara Bersama Kasubid Penagihan Pajak Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 053/DPMTSPTK/IV/2021/SKP/34

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSPTK/NON IZIN-RISET/40229 Tanggal 29 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

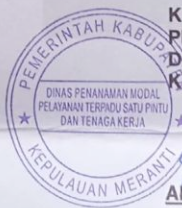
Nama	: Syahrul Hidayad
NIM	: 01870613788
Program Studi	: Perpajakan
Jenjang	: DIII
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Lokasi Penelitian	: Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada Pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 14 April 2021



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

AFRIZAL DHARMA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19740401 199903 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau;
 Yang Bersangkutan;
 Arsip.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2084/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Laporan Penelitian

Pekanbaru, 26 Maret 2021 M
12 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. **Dr. Muhammad April, SH., M.Hum**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Syahrul Hidayad
NIM : 01870613788
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: "**Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti**". Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19731112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1980/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 23 Maret 2021 M
9 Sya'ban 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Syahrul Hidayad
NIM. : 01870613788
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian
dengan judul: "Sistem Pendaftaran Dan Penagihan Pajak Sarang Burung
Walet Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Merdeka No. Telp / Fax. (0763)
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN

Nomor: 973/BPPRD/IV/2021/31

Sehubungan dengan adanya surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, nomor: 053/DPMTSPTK/IV/2021/SKP/34, tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan LTA, maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama	: SYAHRUL HIDAYAD
NIM	: 01870613788
Program Studi	: Perpajakan
Jenjang	: D III
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, guna melengkapi data pada penyusunan LTA yang berjudul: **"Sistem Pendaftaran dan Penagihan Pajak Sarang Burung Walet pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Selatpanjang, 15 April 2021

**An. KEPALA BPPRD
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
SEKRETARIS**

AGIB SUBARDI, ST

NIP.19800827 201102 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/40229
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9//2021 Tanggal 23 Maret 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

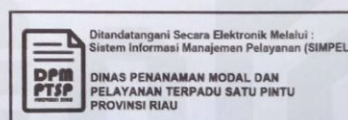
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SYAHRUL HIDAYAD |
| 2. NIM / KTP | : 01870613788 |
| 3. Program Studi | : PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : SISTEM PENDAFTARAN DAN PENAGIHAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
- Up. Kepala DPMTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis lahir di Tanjung Samak pada tanggal 30 Mei 1999, Merupakan putra dari Ayah yang bernama Suhaimi dan ibu bernama Evasufiana. Penulis mengawali pendidikan di SDN 07 Teluk Samak pada tahun 2005-2011, setelah itu penulis melanjutkan sekolah di SMPN 1 Tanjung Samak pada tahun 2011-2014, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMKN 1 Tebing Tinggi pada tahun 2014-2017. Dan di tahun 2018 penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial .

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti selama dua bulan, yaitu dari bulan Juli hingga Agustus 2020, untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul : **“SISTEM PENDAFTARAN DAN PENAGIHAN PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU”**